



LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke : 23 (dua puluh tiga)
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Pejabat Pemerintah (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, dan Kepala Divisi Hukum Polri.
Hari, Tanggal : Senin, 15 Oktober 2018
Pukul : 12.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P. M.Si, Kabag Set. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Pandangan/masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*)
Hadir : 1. orang dari 54 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, diwakili oleh Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Rijal Al Huda;

- b. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, diwakili oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik Keamanan Kemlu RI, Ricky Suhendar;
 - c. Plt. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., L.L.M.;
 - d. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.;
 - e. Kepala Divisi Hukum Polri, diwakili oleh Karo Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri, Brigjen Pol. Dr. Agung Makbul, S.H., M.H.;
- beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Pejabat Pemerintah (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, dan Kepala Divisi Hukum Polri pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P.

II. CATATAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan masukan dan pandangan dari Pejabat Pemerintah terkait dengan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*).
2. Masukan dan pandangan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI dalam melaksanakan pembahasan terhadap RUU tersebut di atas bersama dengan Pemerintah.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 15 Oktober 2018
KETUA RAPAT,

TTD.

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.
A-486